

**IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN *QUICK RESPONSE CODE*
INDONESIAN STANDARD (QRIS) PADA USAHA MIKRO, KECIL,
MENENGAH (UMKM) DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(SKRIPSI)

Oleh

BELLA AULIA SALSABILLA

NPM 2156041021



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

**IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN *QUICK RESPONSE CODE*
INDONESIAN STANDARD (QRIS) PADA USAHA MIKRO, KECIL,
MENENGAH (UMKM) DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh
BELLA AULIA SALSABILLA**

**SKRIPSI
Sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada
Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN *QUICK RESPONSE CODE* *INDONESIAN STANDARD* (QRIS) PADA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

BELLA AULIA SALSABILLA

Implementasi sistem pembayaran digital menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan efisiensi transaksi, khususnya di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi QRIS pada UMKM di Kota Bandar Lampung serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan publik dari Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam indikator: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi, kondisi sosial-ekonomi-politik, serta disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS terbukti mempermudah proses pembayaran non-tunai, serta mendorong pelaku UMKM untuk lebih terbuka terhadap sistem transaksi digital yang modern dan akuntabel. Namun, implementasinya belum berjalan secara optimal karena terkendala oleh akses internet yang belum merata, minimnya sosialisasi, serta beban biaya MDR sebesar 0,3% yang dirasa masih memberatkan sebagian pelaku usaha. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pemerataan infrastruktur digital, edukasi yang lebih intensif, dan penyesuaian kebijakan agar penerapan QRIS dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi, QRIS, UMKM, Digitalisasi, Kebijakan Publik.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) PAYMENT SYSTEM IN MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMES) IN BANDAR LAMPUNG CITY

By

BELLA AULIA SALSABILLA

The implementation of digital payment systems plays a crucial role in driving economic growth and transaction efficiency, particularly among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This study aims to analyze the implementation of QRIS among MSMEs in Bandar Lampung City and identify the obstacles encountered during its execution. The research employs a descriptive qualitative method with data collected through interviews, observations, and documentation. It refers to the public policy implementation theory by Van Meter and Van Horn, which includes six indicators: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, inter-organizational communication, socio-economic-political conditions, and the disposition of implementers. The findings indicate that the use of QRIS has proven to facilitate cashless payment processes and encourage MSME actors to be more receptive to modern and accountable digital transaction systems. However, its implementation has not yet run optimally due to uneven internet access, limited public outreach, and the Merchant Discount Rate (MDR) fee of 0.3%, which is still perceived as burdensome by some business owners. This study recommends the need for equitable digital infrastructure distribution, more intensive education, and policy adjustments to ensure that QRIS implementation can proceed more effectively, inclusively, and sustainably.

Keywords: *Implementation, QRIS, MSMEs, Digitalization, Public Policy.*

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI SISTEM
PEMBAYARAN QUICK RESPONSE
CODE INDONESIA STANDARD (QRIS)
PADA USAHA MIKRO, KECIL,
MENENGAH (UMKM) DI KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : Bella Aulia Salsabilla

Nomor Pokok Mahasiswa : 2156041021

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.

NIP. 19850620 200812 2 001

Dodi Faedulloh, S.Sos., M.Si.

NIP. 19880712 201903 1 012

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

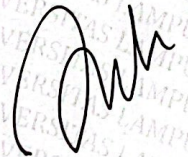
Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.

NIP. 19700914 200604 2 001

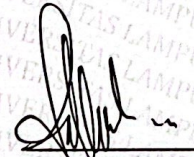
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji:

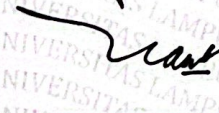
Ketua : Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.



Sekretaris : Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.



Penguji : Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 6 Agustus 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 06 Agustus 2025

Yang membuat Pernyataan,



Bella Aulia Salsabilla
NPM. 2156041021

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Bella Aulia Salsabilla yang lahir di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada tanggal 30 Januari 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Putri dari pasangan Bapak Mukhtar dan Ibu Sri Wahyuni. Penulis memulai pendidikan formalnya dari Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Provinsi Lampung. Selanjutnya, menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 2 Rawa Laut Kota Bandar Lampung. Melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Lalu melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Kemudian, penulis melanjutkan studi pada jenjang Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN Barat) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Selama jadi mahasiswa penulis aktif di organisasi internal kampus. Penulis mengikuti Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara sebagai anggota bidang Kajian Pengembangan Keilmuan (KPK). Penulis juga telah menjalankan magang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung selama satu bulan pada bidang Perbendaharaan dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung selama satu bulan pada bidang Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM, Keuangan Inklusif, dan Syariah (FPPUKIS).

MOTTO

“Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”

(QS. An-Najm: 39)

“Sesungguhnya sesudah ada kesulitan ini ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah sungguh-sungguh urusan lain. Hanya kepada Allah kamu berharap.”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

“No matter how you educated, talented, rich, or cool you believe you are, how you treat people ultimately tells us. Integrity is everything.”

(Bella Aulia Salsabilla)

“Whatever you do, always give your best”

(Bella Aulia Salsabilla)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Atas izin-Nya, penulis diberi kemudahan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa syukur. Tanpa pertolongan dan ridho-Nya, pencapaian ini tentu tak akan terwujud. Dengan sepenuh hati, penulis mempersembahkan karya ini kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Mukhtar dan Ibu Sri Wahyu. Segala pencapaian ini tidak lepas dari doa, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang tiada henti dalam menemani penulis selama menjalani proses penelitian. Terima kasih atas kesabaran, dorongan, serta segala bentuk dukungan moral maupun materiil yang telah menjadi sumber kekuatan penulis di saat menghadapi kesulitan. Penulis sangat bersyukur memiliki sosok orang tua yang tangguh, penuh cinta, dan tulus dalam mendampingi penulis hingga tercapainya mimpi meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan pengorbanan Bapak dan Ibu dengan pahala yang berlipat ganda, serta senantiasa dilimpahkan kesehatan dan kebahagiaan. Aamiin.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Sistem Pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat, yang syafaatnya senantiasa dinantikan di hari akhir. Aamiin ya rabbal 'alamin. Penulis menyadari bahwa selama menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, tidak sedikit tantangan, hambatan, dan rintangan yang harus dihadapi. Namun, berkat pertolongan Allah SWT serta doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, semua proses tersebut dapat dilalui dan diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D., selaku dosen pembimbing utama. Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah Ibu berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap saran, kritik, dan waktu yang Ibu luangkan sangat berarti dan menjadi bekal berharga dalam proses akademik ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan keberkahan kepada Ibu beserta keluarga.
2. Bapak Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing kedua. Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala bimbingan, arahan, serta dukungan yang telah Bapak berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Di tengah kesibukan dan tanggung jawab yang begitu padat, Bapak tetap meluangkan waktu untuk membaca, mengoreksi, dan memberikan masukan yang sangat berharga bagi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan keberkahan kepada bapak beserta keluarga.

3. Prof. Dr. Bambang Utoyo S., M.Si., selaku dosen penguji. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, ilmu, dan masukan berharga yang telah Bapak berikan selama proses ujian dan penyempurnaan skripsi ini. Setiap arahan dan evaluasi yang Bapak sampaikan tidak hanya berkontribusi dalam meningkatkan kualitas karya ilmiah ini, tetapi juga memperluas wawasan serta membentuk pola pikir kritis penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Bapak beserta keluarga.
4. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si., selaku pembimbing akademik. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan arahan yang telah Bapak berikan selama masa studi. Dukungan Bapak sangat berarti bagi penulis dalam menjalani proses perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, serta kelancaran dan kemudahan dalam setiap urusan, serta terus menjadi pribadi yang menginspirasi bagi seluruh mahasiswa.
5. Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas segala bantuan, dukungan, dan arahan yang telah Ibu berikan, khususnya selama proses pengurusan administrasi dan pemenuhan persyaratan hingga terselesaikannya penelitian ini. Semoga Ibu beserta keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT serta diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menjalankan setiap amanah dan tanggung jawab ke depannya.
6. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, yang telah tulus membagikan ilmu, waktu, dan pengalaman hidup selama perkuliahan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan keberkahan yang tiada henti.
7. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, atas bantuan dan pelayanan administrasi selama proses penyusunan skripsi. Ucapan khusus disampaikan kepada Mbak Wulan dan

Mbak Uki atas kesabaran dan kesigapan dalam membantu pengurusan berkas akademik dari awal hingga selesai. Semoga seluruh staf selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam setiap urusan.

8. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Bapak Mukhtar dan Ibu Sri Wahyuni, yang menjadi sumber kekuatan, doa, dan kasih sayang tanpa batas. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, dan cinta yang tak pernah lelah mengiringi setiap langkah penulis hingga mampu sampai pada titik ini. Dalam setiap lelah dan ragu, doa Ayah dan Mama adalah penguat paling tulus yang membuat penulis kembali berdiri dan melangkah. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan betapa besar rasa terima kasih ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga, melindungi, dan membalas setiap kebaikan Ayah dan Mama dengan limpahan kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, dan keberkahan dunia akhirat. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bukti kecil dari cinta dan bakti yang takkan pernah cukup membalas segalanya.
9. Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Abang dan kakakku tercinta, Lendra Angga Pratama, dan Ayu Indah Lestari. Terima kasih atas segala bantuan dan perhatian yang tak pernah henti diberikan dengan penuh keikhlasan demi tercapainya cita-cita untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara ini. Dukungan kalian menjadi kekuatan yang selalu mengiringi setiap langkah, bahkan di saat penulis hampir menyerah. Semoga Allah SWT membalas setiap ketulusan hati dan kebaikan kalian dengan limpahan rezeki, kesehatan, serta kebahagiaan yang senantiasa menyertai setiap langkah hidup.
10. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh informan penelitian yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti proses wawancara. Terima kasih atas segala informasi, saran, masukan, serta arahan yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini. Dukungan serta kesediaan Bapak dan Ibu untuk berbagi pengetahuan menjadi bagian penting dalam kelancaran pengumpulan data. Semoga segala kebaikan dan kontribusi yang diberikan mendapatkan balasan terbaik dan pahala yang berlipat dari Allah SWT.

11. Teruntuk sahabat-sahabat semasa kuliah, Intan, Nadiyah, dan Wike. Terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan. Kehadiran kalian sebagai sahabat yang selalu ada dalam setiap langkah sangat berarti bagi penulis. Terima kasih atas kebersamaan, canda, dan tawa yang menguatkan selama proses penulisan skripsi. Semoga kebersamaan ini tak berhenti di bangku kuliah, dan kelak kita dipertemukan lagi dalam bahagia yang lebih besar, dengan versi terbaik dari diri kita masing-masing.
12. Teruntuk sahabat-sahabatku sejak masa sekolah menengah atas, Sarah, Oxa, Puren, Joan, Dimas, Fadil, Fazil, dan Adel, terima kasih atas kehadiran kalian yang tak pernah pudar seiring waktu. Persahabatan kita bukan hanya tentang kenangan masa remaja, tapi juga tentang bagaimana kalian terus menjadi bagian dari perjalanan hidup ini, termasuk saat penulis menjalani proses skripsi yang penuh tantangan. Dukungan, candaan, dan perhatian kalian selalu berhasil menguatkan hati di tengah lelah dan keraguan. Kalian adalah rumah yang tak pernah jauh meski jarak dan waktu memisahkan.
13. Teruntuk sahabat-sahabatku sejak masa sekolah menengah pertama, Enjel, Zulfa, Annisa, Puja, Steven. Terima kasih yang tulus saya sampaikan atas kebersamaan, perhatian, dan dukungan yang selalu diberikan hingga hari ini. Kehadiran kalian telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya. Semoga silaturahmi dan persahabatan ini terus terjaga, serta kita semua senantiasa diberi kebahagiaan dan kesuksesan di masa depan.
14. Kepada teman-teman seperjuangan dalam menyusun skripsi, yaitu Dila, Wulan, Adit, Agoy, Iqbal, dan Akbar, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta keluh kesah yang telah kita lalui bersama. Setiap tawa, lelah, dan perjuangan menjadi kenangan berharga yang tak akan terlupakan. Semoga perjuangan ini menjadi langkah awal menuju kesuksesan kita di masa depan.
15. Kepada seluruh teman-teman Gilgamara (2021) yang tak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan dan perjuangan selama masa kuliah. Bersama kalian, penulis belajar dan tumbuh melalui berbagai dinamika kehidupan kampus yang penuh warna. Terima kasih atas setiap kenangan dan pengalaman berharga yang telah kita bagi. Semoga kita semua terus melangkah menuju masa depan dengan versi terbaik diri kita,

dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan serta keberkahan di setiap langkah yang kita tempuh.

16. Terakhir, Terima kasih untuk diriku sendiri, karena telah bertahan dan melewati segala proses panjang dalam menyelesaikan skripsi ini. Di balik setiap lembar yang tertulis, tersimpan lelah yang tak selalu tampak, air mata yang jatuh diam-diam, serta keraguan yang kerap menghampiri. Namun, kamu tetap memilih untuk terus melangkah, belajar dari kegagalan, dan berdamai dengan rasa takut. Terima kasih telah bersabar, tetap berusaha, dan tidak menyerah meski dunia terasa berat. Skripsi ini bukan sekadar tugas akhir, tetapi bukti nyata bahwa kamu mampu melewati segala ujian dengan kekuatan dan ketulusan. Aku bangga pada diriku sendiri—karena tetap bertahan, tetap berjuang, dan tetap menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Semoga semangat ini terus menjadi cahaya untuk langkah ke depan.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik	12
2.3 Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan.....	13
2.4 Tinjauan Tentang <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS) 16	
2.5 Tinjauan Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)	21
2.6 Kerangka Pikir Penelitian	22
III. METODE PENELITIAN	25
3.1 Tipe Penelitian	25
3.2 Fokus Penelitian.....	25
3.3 Lokasi Penelitian.....	27
3.4 Jenis dan Sumber Data	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.6 Teknik Analisis Data.....	30
3.7 Teknik Keabsahaan Data.....	31
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
4.1.1. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	33

4.1.2.	Gambaran Umum Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.....	34
4.1.3.	Gambaran Umum UMKM di Kota Bandar Lampung.....	39
4.2	Hasil Penelitian	40
4.2.1.	Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran QRIS pada UMKM di Kota Bandar Lampung.....	41
4.2.2.	Hambatan dalam Implementasi Sistem Pembayaran QRIS pada UMKM di Kota Bandar Lampung.....	69
4.3	Pembahasan.....	73
4.3.1	Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran QRIS pada UMKM di Kota Bandar Lampung.....	73
4.3.2	Hambatan dalam Implementasi Sistem Pembayaran QRIS pada UMKM di Kota Bandar Lampung.....	85
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	91
5.1	Kesimpulan	91
5.2	Saran.....	92
	DAFTAR PUSTAKA.....	94
	LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung Tahun 2020 – 2023	3
Tabel 2. Jumlah Merchant QRIS di Kota Bandar Lampung Tahun 2020 – 2023....	5
Tabel 3. Penelitian Terdahulu	9
Tabel 4. Perbandingan Teori Implementasi Kebijakan.....	15
Tabel 5. Panduan pembagian MDR QRIS bagi merchant	18
Tabel 6. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut UU No.20 Tahun 2008.....	22
Tabel 7. Fokus Penelitian.....	26
Tabel 8. Informan Penelitian.....	28
Tabel 9. Data Jumlah Pegawai Pada Unit Sistem Pembayaran (SP) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Gambaran sebelum dan sesudah adanya QRIS	20
Gambar 2. Kerangka Pikir.....	23
Gambar 3. Tiga Pilar Utama Bank Indonesia	36
Gambar 4. Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung	37
Gambar 5. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025	42
Gambar 6. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Pengguna QRIS di Provinsi Lampung (2024).....	44
Gambar 7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2024	45
Gambar 8. Tahapan Implementasi Sertifikasi Kompetensi SPPUR oleh Bank Indonesia Tahun 2020–2025	46
Gambar 9. Proses Pendaftaran QRIS melalui aplikasi Dompot Digital DANA	49
Gambar 10. Program S.I.A.P QRIS PUSAKA	51
Gambar 11. Program Laris Pakai QRIS (lanjutan)	52
Gambar 12. Struktur Unit Sistem Pembayaran	53
Gambar 13. Kegiatan Rakor antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dengan PJSP.....	56
Gambar 14. Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi QRIS oleh Bank Indonesia kepada Pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung	57
Gambar 15. Pendampingan Pembuatan QRIS bersama Pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung.....	58
Gambar 16. Konten QRIS melalui Media Sosial Resmi Bank Indonesia Provinsi Lampung	59
Gambar 17. Diagram Perbandingan Pengguna Tunai dan QRIS UMKM.....	62
Gambar 18. Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.....	64

Gambar 19. Persepsi Masyarakat Terkait Realita Biaya MDR yang Tidak Sesuai dengan Aturan Kebijakan.....	67
Gambar 20. Kampanye edukasi PEKA (Peduli, Kenali, dan Adukan).....	68
Gambar 21. Tampilan notifikasi kegagalan transaksi akibat jaringan internet bermasalah pada saat penggunaan QRIS	70

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Revolusi Industri 4.0 akan membawa perubahan yang signifikan di berbagai sektor, baik yang direncanakan maupun yang terjadi secara spontan. Dunia usaha menjadi salah satu sektor yang paling terdampak oleh perkembangan ini, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu faktor utama yang mempengaruhi sektor bisnis adalah penerapan *Internet of Things* (IoT), yang menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan internet dalam aktivitas usaha. Oleh karena itu, UMKM perlu beradaptasi dengan era ini, misalnya dengan mulai mengintegrasikan teknologi digital dan internet ke dalam operasional bisnis mereka. Dunia usaha perlu beradaptasi dengan perubahan di era Revolusi Industri 4.0 untuk memastikan kelangsungan bisnis. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan internet sebagai sarana pemasaran, sekaligus menyesuaikan dengan preferensi konsumen yang semakin condong pada pembelian secara online dibandingkan offline (Ayodya, 2020).

UMKM di Indonesia memainkan peran yang sangat krusial dalam perekonomian nasional, dengan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto (60%) dan penyerapan tenaga kerja (97%). Namun, meskipun UMKM mendominasi sektor usaha dengan 90%, pelaku usaha hanya 16% dari mereka yang telah berpartisipasi dalam ekosistem ekonomi digital. Ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam mendorong digitalisasi di sektor UMKM yang merupakan salah satu pilar utama ekonomi Indonesia. Untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan UMKM, perlu ada upaya yang lebih besar dalam mendukung transformasi digital, termasuk edukasi, akses teknologi, dan penyediaan infrastruktur yang memadai (Yolanda, 2024).

Dampak perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran tersebut terakhir ini adalah munculnya instrumen pembayaran yang dikenal dengan uang elektronik (*electronic money/e-money*). Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena nilai uang yang disimpan, instrumen ini dapat ditempatkan pada suatu media tertentu yang mampu diakses dengan cepat secara offline, aman dan murah. Selain itu kemunculan uang elektronik juga dilatar belakangi oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik. Regulasi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan kemudian diperbarui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Perubahan-perubahan tersebut memperkuat posisi BI dalam mengatur dan mengawasi sistem keuangan serta pembayaran, sekaligus mendorong inklusi keuangan dengan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, termasuk uang elektronik. Undang-undang ini menjadi dasar hukum penting untuk pengembangan kebijakan moneter dan sistem pembayaran di Indonesia, termasuk regulasi terkait uang elektronik dan upaya mendorong masyarakat menuju *less cash society* (Hendarsyah, 2016).

Saat ini terdapat beberapa penyedia uang elektronik yang beroperasi di Indonesia sebagai alat pembayaran non tunai yang dapat digunakan dalam berbagai sektor usaha, termasuk Gopay, OVO, Dana, dan LinkAja. Kehadiran beragam aplikasi pembayaran non tunai membuat pedagang kesulitan dalam menyediakan banyak opsi pembayaran, sehingga sebelum QRIS diperkenalkan, beberapa jenis kode QR mengharuskan kasir untuk menyediakan layanan pembayaran non tunai. Dalam rangka peringatan HUT RI ke-74 pada tanggal 17 Agustus 2019, Bank Indonesia memperkenalkan standar *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai solusi untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi pembayaran berbasis kode QR. QRIS memiliki kemampuan untuk beroperasi di semua pedagang yang bermitra dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Pengguna aplikasi e-wallet seperti Dana, LinkAja, Gopay, dan OVO dapat melakukan transaksi dengan toko atau pedagang dengan cara memindai kode QRIS yang disediakan oleh

pedagang menggunakan satu jenis aplikasi e-wallet. Hal ini meningkatkan efisiensi dan keterjangkauan dalam transaksi pembayaran, mempercepat inklusi keuangan di Indonesia, serta meningkatkan tingkat kemajuan UMKM, yang semuanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (Bank Indonesia, 2020).

Kota terbesar di Provinsi Lampung adalah Kota Bandar Lampung, yang juga merupakan ibu kota provinsi tersebut. Kota ini berfungsi sebagai pusat ekonomi, perdagangan, dan pendidikan di Lampung. Dengan populasi yang padat dan berbagai fasilitas yang lengkap, Bandar Lampung menjadi lokasi penting bagi berbagai aktivitas sosial dan ekonomi. Di Kota Bandar Lampung terdapat 1.073.451 jiwa penduduk yang mendiami wilayah seluas 192.96 km². Kota Bandar Lampung merupakan kota dengan pemilik UMKM yang cukup banyak dan tersebar di 20 kecamatan dengan 126 kelurahan. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan jumlah UMKM yang ada di kota Bandar Lampung:

Tabel 1. Jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung Tahun 2020 – 2023

No.	Tahun	Jumlah UMKM
1.	2020	118.533
2.	2021	118.533
3.	2022	4.460
4.	2023	30.940

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, (Diolah peneliti, 2025).

Berdasarkan pada tabel di atas Pertumbuhan UMKM di Kota Bandar Lampung dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang signifikan. Pada tahun 2020 hingga 2021, jumlah UMKM tercatat stagnan di angka 118.533, karena dampak pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas ekonomi dan pembaruan data. Pada tahun 2022, jumlah UMKM menurun drastis menjadi 4.460, akibat verifikasi ulang data oleh pemerintah, sehingga UMKM yang tidak aktif atau tidak memenuhi kriteria dikeluarkan dari daftar. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan tajam menjadi 30.940, mencerminkan pemulihan ekonomi pasca pandemi dan munculnya banyak usaha baru.

Implementasi sistem pembayaran non-tunai, baik untuk transaksi online maupun offline, beriringan dengan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang semakin meningkat, memudahkan proses transaksi antara

pelanggan dan pelaku UMKM. Penggunaan QR Code dalam sistem pembayaran QRIS berfungsi untuk menstandarisasi semua pembayaran non-tunai. Salah satu alasan utama pengembangan QRIS adalah untuk mengatasi masalah yang dihadapi pelaku UMKM, yang sebelumnya harus menyediakan berbagai kode QR dari berbagai penerbit untuk setiap transaksi non-tunai. Dengan banyaknya aplikasi dompet digital yang tersedia, penjual diharuskan untuk menyediakan sejumlah layanan kode QR sesuai dengan jumlah aplikasi yang ada. Hal ini menciptakan kompleksitas, karena setiap aplikasi memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda untuk pemindaian kode QR. Keberadaan berbagai kode QR dari penjual dapat menyebabkan kebingungan dan kerepotan bagi konsumen dalam melakukan pemindaian, karena mereka harus memahami dan menyesuaikan dengan setiap ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, QRIS hadir sebagai solusi yang menyederhanakan proses pembayaran, memungkinkan konsumen untuk cukup memindai satu kode QR yang diterima oleh berbagai aplikasi dompet digital. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi pelanggan (Listiyono, H., dkk., 2024).

Fenomena tersebut dipetakan oleh Bank Indonesia sebagai pemegang regulasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. Untuk mendukung tercapainya sistem yang terintegrasi tersebut, Bank Indonesia menetapkan standar kode QR pembayaran dalam memfasilitasi transaksi pembayaran digital di Indonesia yang disebut QRIS untuk melakukan transaksi atau pembayaran nontunai dengan pembeli secara lebih efisien dengan penggunaan QRIS. QRIS bisa dimanfaatkan melalui aplikasi pembayaran yang terpasang di telepon genggam yang terkoneksi dengan internet. Keuntungan menggunakan QRIS adalah memudahkan UMKM memberikan uang kembalian kepada konsumen dan mengurangi kebiasaan untuk membawa uang tunai saat berbelanja. Selain itu, pembayaran non-tunai melindungi pelaku usaha dari penerimaan uang palsu selama transaksi (Darwiyani, A. P., dkk., 2023).

Salah satu penelitian yang menunjukkan manfaat penggunaan QRIS pada UMKM di Kota Bandar Lampung adalah penelitian yang mengkaji efektivitas penggunaan

QRIS di tiga UMKM: KL Coffee, Kopi Ketje Kedaton, dan Marley's Cafe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS secara signifikan meningkatkan omset penjualan di ketiga usaha tersebut (Christine, N., 2023). Ekonom Senior Bank Indonesia (BI) Perwakilan Lampung Fiskara Indawan, mengatakan Jumlah *merchant* yang menggunakan QRIS hingga 31 Agustus 2024 terbanyak berasal dari Kota Bandar Lampung dengan jumlah mencapai 266.742 *merchant* (Kanafi, R. I. S., 2024).

Tabel 2. Jumlah Merchant QRIS di Kota Bandar Lampung Tahun 2020 – 2023

No.	Tahun	Jumlah <i>Merchant</i> QRIS	Laju Pertumbuhan
1.	2020	47.589	-
2.	2021	101.740	73,68%
3.	2022	205.873	73,68%
4.	2023	249.314	73,68%

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, (Diolah peneliti, 2025).

Berdasarkan Tabel 2 di atas, jumlah *merchant* QRIS di Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, jumlah *merchant* tercatat sebanyak 47.589 unit. Angka ini kemudian melonjak menjadi 101.740 *merchant* pada tahun 2021, 205.873 *merchant* pada tahun 2022, dan mencapai 249.314 *merchant* pada tahun 2023. Jika dihitung menggunakan rumus laju pertumbuhan rata-rata per tahun selama periode tersebut adalah sebesar 73,68%. Artinya, setiap tahunnya jumlah *merchant* QRIS di Kota Bandar Lampung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Penelitian mengenai implementasi QRIS pada UMKM yang dilakukan oleh (Baihaqi, M. A., 2024) di Kota Semarang yang menerangkan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi QRIS memberikan kemudahan transaksi, meningkatkan keamanan, dan membantu pencatatan keuangan UMKM. Namun, masih terdapat kendala seperti ketergantungan pada koneksi internet, rendahnya literasi digital, serta beban biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) sebesar 0,3%. Kurangnya sosialisasi juga menyebabkan banyak pelaku UMKM enggan menggunakan QRIS. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan peningkatan infrastruktur digital agar penerapan QRIS lebih optimal.

Penelitian lainnya mengenai implementasi sistem pembayaran QRIS pada UMKM juga pernah diteliti oleh (Amanda, dkk., 2021) dengan judul Implementasi Kebijakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pontianak yang mengatakan bahwa implementasi QRIS di Kota Pontianak belum optimal karena rendahnya pemahaman UMKM, keterbatasan akses teknologi, dan preferensi transaksi tunai. Kurangnya koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah juga menghambat adopsi QRIS. Diperlukan peningkatan edukasi, dukungan infrastruktur, dan kerja sama lebih erat untuk mempercepat digitalisasi UMKM.

Mengacu pada berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan dalam penerapan sistem pembayaran QRIS. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan fokus pada analisis sejauh mana sistem pembayaran QRIS telah diimplementasikan dengan baik dan bagaimana pengaruhnya terhadap UMKM di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat pelaksanaan QRIS di kalangan UMKM, baik dari sisi teknis, sumber daya, maupun tingkat literasi digital. Relevansi antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada pengkajian kebijakan terkait implementasi sistem pembayaran QRIS, yang menjadi perhatian utama dalam mendukung pengembangan UMKM dan mempercepat transformasi ekonomi digital di tingkat lokal maupun nasional.

Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam sistem pembayaran menggunakan QRIS. Peneliti menemukan bahwa beberapa UMKM pengguna QRIS membebankan biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) kepada konsumen. MDR merupakan biaya yang dikenakan kepada pemilik usaha (merchant) setiap kali terjadi transaksi menggunakan QRIS dan seharusnya menjadi kewajiban yang ditanggung oleh merchant. Bank Indonesia juga telah menetapkan bahwa merchant dilarang membebankan biaya tambahan kepada konsumen yang menggunakan jalur pembayaran nontunai. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, beberapa pelaku usaha justru membebankan biaya MDR kepada konsumen. Sebagian besar pelaku usaha enggan menanggung biaya tambahan atas penjualan barang dan/atau jasa mereka karena dianggap dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh. Hal ini

dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap penggunaan QRIS dan menghambat upaya peningkatan inklusi keuangan di kalangan UMKM. Selain itu, rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap aspek teknis dan regulasi QRIS menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis sejauh mana implementasi QRIS telah berjalan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Untuk itu mengacu pada fenomena-fenomena yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan bahasan “Implementasi Sistem Pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Di Kota Bandar Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yakni:

1. Bagaimana implementasi sistem pembayaran QRIS pada UMKM di Kota Bandar Lampung?
2. Apa saja kendala dalam implementasi sistem pembayaran QRIS pada UMKM di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui proses pengimplementasian sistem pembayaran QRIS pada UMKM di Kota Bandar Lampung
2. Untuk menganalisis kendala-kendala dalam implementasi sistem pembayaran QRIS pada UMKM di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi akademisi di bidang ilmu administrasi negara, khususnya terkait

penggunaan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), yang memiliki relevansi dalam penelitian tentang implementasi kebijakan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta informasi yang dapat menjadi referensi, khususnya bagi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, pelaku UMKM, masyarakat, serta para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam implementasi sistem pembayaran QRIS di Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang digunakan dalam tinjauan pustaka berfungsi untuk menyusun alur yang sistematis dalam konsep dan teori. Untuk melengkapi penelitian ini, penulis menjadikan penelitian sebelumnya sebagai rujukan atau standar. Adapun penelitian sebelumnya yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Limitasi Penelitian
1.	Muhammad Akbar Baihaqi., (2024)	Penerapan Sistem Pembayaran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) pada UMKM di Kota Semarang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi QRIS di Kota Semarang memberikan kemudahan transaksi, meningkatkan keamanan, dan membantu pencatatan keuangan UMKM. Namun, masih terdapat kendala seperti ketergantungan pada koneksi internet, rendahnya literasi digital, serta beban biaya <i>Merchant Discount Rate</i> (MDR) sebesar 0,3%. Kurangnya sosialisasi juga menyebabkan banyak pelaku UMKM enggan menggunakan QRIS. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan peningkatan infrastruktur digital agar penerapan QRIS lebih optimal.	Fokus penelitian ini adalah memahami penerapan QRIS pada UMKM di Kota Semarang, dengan meneliti tingkat adopsi, manfaat, serta hambatan yang dihadapi pelaku usaha, baik yang sudah maupun yang belum menggunakan QRIS.

2.	Ayunda Azhari., (2021).	Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standar (Qris) Pada Sektor Umkm Di Kota Pematangsiantar	Penelitian ini menemukan bahwa implementasi QRIS di UMKM Kota Pematangsiantar meningkatkan efisiensi transaksi dan mendorong digitalisasi keuangan. Meskipun memberikan kemudahan dan keamanan, masih ada kendala seperti kurangnya pemahaman pelaku UMKM dan keterbatasan infrastruktur. Namun, adopsi QRIS terus berkembang, membantu pertumbuhan UMKM dan perekonomian daerah.	Fokus penelitian ini menganalisis implementasi QRIS pada UMKM di Pematangsiantar, mencakup pemahaman, manfaat, dan hambatan penggunaannya. Mayoritas pelaku UMKM mengenal QRIS sebagai metode pembayaran digital yang mempermudah transaksi. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah koneksi internet yang tidak stabil dan biaya Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 0,07%.
3.	Zhafiera Ivaliant Amanda, Netty Herawati, Dwi Haryono., (2021).	Implementasi Kebijakan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kota Pontianak	Hasil penelitian menunjukkan implementasi QRIS di Kota Pontianak belum optimal karena rendahnya pemahaman UMKM, keterbatasan akses teknologi, dan preferensi transaksi tunai. Kurangnya koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah juga menghambat adopsi QRIS. Diperlukan peningkatan edukasi, dukungan infrastruktur, dan kerja sama lebih erat untuk mempercepat digitalisasi UMKM.	Fokus penelitian ini adalah implementasi QRIS dalam mendukung UMKM di Kota Pontianak, mengidentifikasi kendala seperti kurangnya pemahaman, keterbatasan teknologi, dan preferensi transaksi tunai. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori Edward III, penelitian menegaskan perlunya peningkatan sosialisasi dan kolaborasi antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah untuk mempercepat adopsi QRIS dan digitalisasi UMKM.
4.	Sinta Kerta Asmita, Adhitya Bayu Suryantara., (2024).	<i>The implementation of QRIS-based payment gateway system for the development of MSMEs</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS membantu UMKM beradaptasi dengan transaksi digital, meningkatkan efisiensi, dan	Fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi QRIS dalam mendukung

			mendorong pertumbuhan ekonomi. QRIS mempermudah pencatatan keuangan, meningkatkan penjualan, serta melindungi dari risiko uang palsu, sehingga mendukung percepatan digitalisasi UMKM dan pemulihan ekonomi.	digitalisasi UMKM dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. QRIS membantu pelaku usaha beradaptasi dengan transaksi non-tunai, meningkatkan efisiensi, serta mempercepat digitalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS berperan penting dalam meningkatkan penjualan dan mempermudah transaksi bagi UMKM.
5.	Vimala Balakrishnan, Nor Liyana Mohd Shuib., (2021).	Drivers and inhibitors for digital payment adoption using the Cashless Society Readiness-Adoption model in Malaysia	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan masyarakat Malaysia untuk adopsi pembayaran digital dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong dan penghambat.	Fokus Penelitian terletak pada identifikasi faktor pendorong (drivers) dan penghambat (inhibitors) adopsi pembayaran digital di Malaysia. Penelitian berfokus pada kesiapan masyarakat Malaysia untuk adopsi pembayaran digital secara umum, tanpa fokus spesifik pada UMKM atau wilayah tertentu.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang penulis paparkan, relevansi dalam penelitian ini adalah terletak pada fokusnya terhadap implementasi QRIS pada UMKM, khususnya dalam mengidentifikasi manfaat, hambatan, dan tingkat adopsi QRIS. Seperti penelitian sebelumnya, penelitian ini juga menyoroti tantangan teknis dan regulasi, seperti biaya MDR serta tingkat literasi digital pelaku usaha. Secara keseluruhan, kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis faktor teknis dan regulasi dalam penerapan QRIS, khususnya terkait kepatuhan UMKM terhadap aturan BI, serta dampak sistem pembayaran digital ini terhadap

keberlanjutan UMKM di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini memberikan perspektif lebih mendalam mengenai tantangan implementasi QRIS, termasuk hambatan infrastruktur, literasi digital, dan kebijakan biaya transaksi, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) yang lebih menekankan pada variabel kinerja kebijakan dan interaksi antaraktor.

2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai sebuah tujuan. Kebijakan publik juga diartikan sebagai alat pemerintah untuk memecahkan permasalahan yang muncul dan memberikan solusi kepada masyarakat. Lebih lanjut kebijakan publik digambarkan sebagai tindakan yang dilakukan (Purba et al, 2022). Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Dunn (1994) dalam (Pasolong, 2013), kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain- lain.

Hal serupa juga disampaikan oleh Thomas R Dye dalam (Rusli, 2015) bahwa kebijakan negara menyangkut pilihan-pilihan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu. Kemudian Richard Rose dalam (Rusli, 2015) juga menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikitnya kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Dari beberapa definisi para ahli diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah dalam bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu yang bertujuan sebagai penyelesaian atau solusi atas sebuah persoalan yang dihadapi.

2.3 Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan merupakan tahap krusial pada siklus kebijakan yang menghubungkan perencanaan dengan hasil nyata. Dalam pandangan Mazmanian dan Sabatier dalam (Pramono, 2020), implementasi adalah sebuah proses sistematis yang berperan untuk menjalankan kebijakan dengan cara yang efektif agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Mereka memandang implementasi sebagai aktivitas yang dimulai hanya setelah kebijakan dirancang, sehingga proses ini berfokus pada langkah-langkah konkret untuk mengoptimalkan keberhasilan pencapaian sasaran.

Sementara itu, Van Meter dan Van Horn (1975) memperluas pemahaman berkenaan dengan implementasi bersama menekankan keterlibatan berbagai aktor, baik individu, kelompok, pemerintah, maupun swasta. Mereka menunjukkan bahwa implementasi adalah proses kolaboratif yang bergantung pada peran berbagai pihak yang terlibat dalam mencapai tujuan kebijakan. Perspektif ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan implementasi bukan sebatas memiliki ketergantungannya pada perumusan kebijakan, melainkan pula pada kerja sama serta interaksi antara para pelaksana serta dukungan dari aktor yang relevan.

Dengan demikian, kedua pandangan ini melengkapi pemahaman tentang implementasi kebijakan. Mazmanian dan Sabatier menyoroti pentingnya efektivitas langkah-langkah implementasi yang terstruktur, sementara Van Meter dan Van Horn (1975) menggarisbawahi pentingnya kerja sama antaraktor untuk mencapai tujuan kebijakan. Implementasi, dalam hal ini, bukan sekadar menjalankan rencana, tetapi juga melibatkan dinamika dan koordinasi lintas sektor agar hasilnya dapat dirasakan secara nyata di masyarakat.

Pada pandangan George C. Edward III (1980) dalam (Subarsono, 2005), pengimplementasian kebijakan tidaklah sekadar tahap administratif, melainkan merupakan bagian integral dari keseluruhan proses kebijakan yang melibatkan interaksi antara berbagai pihak legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menghasilkan regulasi yang relevan dan memberi dampak langsung pada masyarakat. George C. Edward III (1980) menyoroti pentingnya perhatian yang lebih besar terhadap implementasi, yang seringkali terabaikan dalam banyak kasus

kebijakan. Ketidakberhasilan implementasi kebijakan, menurutnya, banyak disebabkan oleh kurangnya fokus pada tahap ini, meskipun kebijakan tersebut telah disusun dengan baik di tingkat perencanaan.

George C. Edward III (1980) mengembangkan model "*direct and indirect impact on implementation*" yang menggambarkan bagaimana kebijakan dapat memiliki dampak langsung atau tidak langsung pada pelaksanaannya. Dampak langsung mencakup tindakan yang segera terlihat setelah kebijakan diterapkan, sementara dampak tidak langsung mencakup faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi keberhasilan kebijakan, tetapi tidak selalu tampak secara langsung. Kedua jenis dampak ini harus dipertimbangkan secara komprehensif agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif. George C. Edward III (1980) kemudian mengidentifikasi empat isu pokok yang menurutnya sangat mempengaruhi keberhasilan pengimplementasian kebijakan, meliputi yakni (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, beserta (4) susunan birokrasi. (Tresiana, N. & Djuaji, N. 2017).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, terlihat bahwa implementasi kebijakan lebih dari sekadar pelaksanaan teknis membutuhkan koordinasi lintas sektor serta peranan yang aktif melalui seluruh pihaknya yang memiliki keterlibatannya, serta perhatian khususnya dalam berbagai faktor yang mampu menjadi pemengaruh keberhasilan pelaksanaannya. Tanpa perhatian yang memadai terhadap aspek-aspek ini, kebijakan, meskipun sudah dirancang dengan baik, berisiko gagal atau tidak memberikan hasil yang optimal.

Perbandingan antara pandangan Mazmanian dan Sabatier, Van Meter dan Van Horn (1975), dan George C. Edward III (1980) pada urusan implementasi kebijakan memperlihatkan bahwasanya ketiganya memberi sorotan pada krusialnya meninjau implementasi kebijakan dengan cenderung luas dibanding sekedar pelaksanaan teknis. Dalam praktik, penggabungan atas ketiga pendekatan ini mampu menyediakan wawasan yang cenderung komprehensif berkaitan dengan tahapan dari implementasi kebijakan. Mazmanian dan Sabatier fokus pada pentingnya keselarasan antara kebijakan yang direncanakan dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif melalui faktor struktural beserta sumber daya

yang mendukung. Van Meter dan Van Horn (1975), di sisi lain, menekankan interaksi antar berbagai aktor baik dari sektor publik maupun swasta yang harus bekerja sama untuk mencapai tujuan kebijakan, sehingga mereka menyoroti pentingnya koordinasi dan kolaborasi dalam implementasi. George C. Edward III (1980), sementara itu, memberikan perhatian khusus pada aspek praktis dan sering kali terabaikan dalam implementasi, seperti komunikasi yang jelas, disposisi pelaksana yang tepat, dan struktur birokrasi yang efisien. Berikut adalah perbandingan teori implementasi kebijakan antara Mazmanian dan Sabatier, Van Meter dan Van Horn (1975), dan George C. Edward III (1980).

Tabel 4. Perbandingan Teori Implementasi Kebijakan

No	Teori	Kelebihan	Kekurangan	Relevansi
1.	Mazmanian & Sabtier (1980)	Menekankan pentingnya konteks sosial, politik, dan ekonomi dalam implementasi kebijakan. Memperhatikan interaksi antara berbagai pemangku kepentingan.	Bersifat <i>top-down</i> , sehingga kurang mempertimbangkan dinamika lapangan dan masukan dari aktor yang lebih kecil seperti UMKM.	Relevan untuk menganalisis bagaimana konteks lokal di Bandar Lampung mempengaruhi adopsi QRIS oleh UMKM, serta bagaimana interaksi antara Bank Indonesia dan pelaku UMKM dapat memengaruhi keberhasilan implementasi.
2.	Van Meter Van Horn (1975)	Memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi hasil implementasi, termasuk, standar an sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, politik, dan disposisi atau sikap.	Kompleksitas analisis dapat menjadi tantangan dalam penerapan praktis di lapangan.	Sangat relevan karena penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi implementasi QRIS, termasuk pemahaman pelaku UMKM, serta koordinasi pihak regulator dan pemerintah.
3.	George C. Edward III (1980)	Menyediakan pendekatan sistematis dengan fokus pada empat variabel kunci: komunikasi, sumber daya, disposisi	kurang memperhatikan aspek eksternal seperti kondisi sosial-ekonomi lokal, preferensi pelaku UMKM, serta tantangan	Cukup relevan untuk mengukur peran komunikasi antara Bank Indonesia dan UMKM dalam menyampaikan aturan QRIS, serta efektivitas struktur

pelaksana, struktur birokrasi.	dan	politik dan regulasi yang memengaruhi implementasi kebijakan.	pelaksana di tingkat lokal.
-----------------------------------	-----	--	--------------------------------

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025.

Peneliti memilih teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) karena teori ini menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk dalam konteks sistem pembayaran QRIS pada UMKM di Kota Bandar Lampung. Teori ini mencakup indikator penting seperti standar kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, keadaan sosial, ekonomi, serta politik, dan disposisi atau sikap pelaksana. Dengan menggunakan teori ini, peneliti dapat mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung serta menghambat penerapan QRIS, seperti pemahaman pelaku UMKM terhadap kebijakan QRIS, dan dukungan dari lembaga terkait seperti Bank Indonesia dan Pemerintah. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi QRIS sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka mendorong inklusi keuangan dan transformasi digital di sektor UMKM. Dengan demikian, teori Van Meter dan Van Horn (1975) menjadi alat analisis yang relevan dan efektif untuk memahami dinamika implementasi QRIS dalam konteks lokal yang spesifik.

2.4 Tinjauan Tentang Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

QRIS yakni standar dari kode QR yang dipergunakan teruntuk pembayaran di Indonesia, yang dilakukan pengembangannya melalui Bank Indonesia beserta Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) guna menyediakan fasilitas akan tahapan pembayaran (Sriekaningsih, 2020). Seluruh yang menyiapkan layanan pembayaran dengan basis kode QR diharuskannya agar mempergunakan QRIS yang berkesesuaian pada ketentuan yang diaturnya melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 19 Februari 2025 (Perubahan Ketiga atas PADG 21/18/PADG/2019) tentang Implementasi Standard Internasional untuk pelaksanaan pembayaran

QRIS yakni satu pengupayaan teruntuk standarisasi melalui Bank Indonesia dalam pemakaian metode kode QR menjadi pembayaran. Tujuannya yakni teruntuk membuatnya lebih sederhana, mempercepatnya, serta mempertahankan adanya keamanan pada tahapam transaksi memakai kode QR (Tarman, M., 2023). Bank Indonesia mengambil konsepnya “UNGGUL” dengan pengimplementasian QRIS ini. Konsep “UNGGUL” pada hal ini mengandung artian sebagai berikut:

1. Universal: seluruh lapisan masyarakat baik dalam maupun luar negeri dapat menggunakan QRIS untuk bertransaksi.
2. Gampang: mudah, aman dan dalam satu genggam dalam bertransaksi secara nontunai
3. Untung: Efisien, satu code QR untuk seluruh aplikasi
4. Langsung: kelancaran sistem pembayaran yang menyebabkan transaksi ini menjadi lebih cepat diterima.

Tujuan utama akan keberadaan QRIS yakni teruntuk memudahkan transaksi pembayaran digital yang diperuntukan kepada masyarakat serta membuka kemungkinan adanya pengawasan melalui regulator pada sebuah pintu. QRIS 21 tercipta menjadi pengupayaan guna membentuk "satu sistem bagi seluruh model pembayaran" yang mampu dipergunakan segala lapisan dari masyarakat. Maka QRIS mampu dipergunakan dalam seluruh merchant yang bekerja sama bersama PJSP contohnya OVO, LinkAja, Gopay, DANA, Bukalapak, serta lainnya (Sriekaningsih, A. 2020).

Mulai 1 Januari 2020, seluruh Penyelenggara layanan pembayaran (PJSP) diwajibkan oleh Bank Indonesia untuk mengadopsi sistem pembayaran menggunakan QRIS sebagai pemersatu seluruh aplikasi pembayaran yang menggunakan QR Code. Kemudian, QRIS dapat dimanfaatkan oleh merchant yang memiliki hubungan dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Karena sistem QR Code ini beroperasi dalam Merchant Presented Mode (MPM). Pengguna hanya perlu memindai QR Code pada perangkat QRIS mereka di merchant-merchant yang berpartisipasi yang mendukung transaksi QR. Merchant yang menerima antara lain LinkAja, Gopay, OVO, DANA, dan Bukalapak. Cukup menggunakan satu Kode QR terintegrasi. Dengan demikian, transaksi dapat

diselesaikan terlepas dari aplikasi pembayaran QR yang digunakan oleh pengguna. Batasan transaksi yang diizinkan berdasarkan pedoman penerapan QRIS adalah Rp 2.000.000 per transaksi. Penerapan QRIS merupakan salah satu tujuan dari visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025. Dengan QRIS diharapkan transaksi pembayaran menjadi lebih efisien atau sederhana, inklusi keuangan di Indonesia akan meningkat, dan UMKM akan menjadi lebih canggih, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada setiap transaksi juga akan dikenakan biaya MDR (*Merchant Discount Rate*). MDR QRIS adalah biaya jasa yang dikenakan kepada merchant oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) saat bertransaksi menggunakan QRIS. BI sebagai regulator tidak mengambil bagian dari biaya MDR ini sepenuhnya diberikan kepada industri. Industri tersebut meliputi lembaga issuer, lembaga acquirer, lembaga switching, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN). Biaya MDR ditanggung oleh merchant dan tidak boleh dibebankan kepada konsumen. Besarnya biaya MDR ditetapkan oleh BI dan berlaku sesuai dengan kategori merchant dan nilai transaksi. Berikut adalah Pembagian tarif MDR saat bertransaksi menggunakan QRIS. Kebijakan ini berlaku efektif mulai 15 Maret 2025 sebagaimana tertuang dalam Siaran Pers RDG Februari 2025.

Tabel 5. Panduan pembagian MDR QRIS bagi merchant

Jenis Merchant	Kategori	Nominal Transaksi	% MDR
Reguler	Usaha Mikro (UMI)	≤Rp500.000,00 (kurang dari atau sama dengan lima ratus ribu rupiah)	0%
		Nominal Transaksi >Rp500.000,00 (lebih dari lima ratus ribu rupiah)	0,3%
Khusus	Usaha Kecil (UKE), Usaha Menengah (UME), dan Usaha Besar (UBE)		0,7%
	Pendidikan		0,6%
	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)		0,4%
	Badan Layanan Umum (BLU), <i>Public Service Obligation</i> (PSO), <i>Government to People</i> (G2P) seperti Bantuan Sosial (Bansos), People		0%

to Government (P2G) antara lain pajak, paspor, dan donasi sosial (nirlaba)

Sumber: Bank Indonesia, 2025.

Berdasarkan Tabel 5 mengenai panduan pembagian *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (2025), diketahui bahwa tarif MDR sebesar 0,3% berlaku bagi *merchant* kategori usaha mikro (UMI) dengan nominal transaksi lebih dari Rp500.000,00. Artinya, setiap transaksi yang dilakukan menggunakan QRIS pada usaha mikro dan melebihi batas nominal tersebut akan dikenakan potongan sebesar 0,3% dari total nilai transaksi. Dalam konteks MDR QRIS, potongan 0,3% berarti setiap transaksi akan dipotong sebesar tiga per seribu dari nominal transaksinya. Sebagai contoh, apabila seorang konsumen melakukan pembayaran sebesar Rp1.000.000 melalui QRIS, maka potongan MDR sebesar 0,3% berarti: $0,3\% \times \text{Rp}1.000.000 = 0,003 \times \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp}3.000$.

1. Jenis Mekanisme Transaksi Menggunakan QRIS

1) *Merchant Presented Mode*

Teknik yang dipergunakan pada jenis ini yakni merchat memiliki persediaan akan kode QR serta sewaktu pelanggan menjalankan pembelian membuat pelanggan diharuskan untuk scan kode QR yang tersediakan melalui merchat. Terdapat 2 bentuk kode QR *Merchant Prented Mode*:

a. Statis

- a) *Print-Out* Stiker QRIS memperlihatkan ID *Merchant* bersama kode QR yang sifatnya tetap.
- b) Pelanggan mampu mengetik total nominal transaksi pada aplikasi pembayaran digital yang terdapat di smartphone milik pelanggan.

b. Dinamis

- a) Mesin *Electronic Data Capture* (EDC) akan mengeluarkan struk pembayaran bersama kode QR serta memperlihatkan nominal pembayaran melalui monitornya.
- b) Setiap transaksi teridentifikasi melalui kode QR yang unik.
- c) Dalam Kode QR nominal transaksi juga terdapat di dalamnya.

2) *Customer Presented Mode*

Setiap orang mampu mempergunakan kode *Customer Presented Mode* serta teruntuk mekanisme mampu dijalankan melalui tahapan yakni pelanggan mampu melakukan pemilihan serta melakukan pengunduran dalam beragam aplikasi pembayaran digital dengan lewat ponsel pintar, selanjutnya pastikanlah aplikasi itu terdapat saldo yang tergolong cukup serta yang paling akhir pemilik merchant menjalankan *scan* kode QR yang diperlihatkan lewat ponsel pintar pelanggan mempergunakan mesin yang sudah tersediakan.

Persyaratan yang diharuskan pemenuhannya melalui individu yang berkeinginan untuk menjalankan transaksi mempergunakan QRIS yakni punya smartphone yang juga memiliki koneksinya dengan internet, aplikasi pembayaran digital beserta saldo yang cukup pada nilai transaksi di aplikasi pembayaran digital.

- a. Cara Transaksi Sebelum QRIS Merchant harus menyediakan beberapa aplikasi pembayaran di tokonya. Konsumen yang membayar secara non tunai, harus memastikan bahwa aplikasi pembayaran yang dimilikinya harus tersedia pada *merchant*.
- b. Cara Transaksi Setelah QRIS, *merchant* tidak perlu lagi menyiapkan beberapa aplikasi pembayaran; mereka hanya perlu menunjukkan satu kode QR di toko, yang dapat dibaca oleh konsumen menggunakan berbagai program pembayaran diponsel mereka.



Gambar 1. Gambaran sebelum dan sesudah adanya QRIS

Sumber: Bank Indonesia, 2021.

2.5 Tinjauan Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

UMKM merupakan kepanjangan dari Usaha Mikro, Kecil, Menengah. UMKM sendiri pada dasarnya adalah sebuah usaha atau bisnis yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, atau badan usaha. Lebih jelasnya, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam UU tersebut disebutkan UMKM adalah sesuai jenis usahanya yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Penggolongan UMKM dilakukan dengan batasan omset per tahun. Definisi UMKM adalah sebagai berikut. Sulaeman, S. (2023).

1. Usaha Mikro yakni satu usaha yang produktif yang kepemilikan dari perseorangan maupun badan deusaha kepemilikan dari perorangan yang mencukupi kriteria usaha mikro seperti yang diaturnya pada UU ini.
2. Usaha Kecil yakni usaha ekonomi produktif yang berdirinya dengan mandiri, yang dilakukan pengoperasiannya dengan perorangan maupun badan usaha yang tidak menjadi anakan dari perusahaan maupun tidak merupakan cabang dari perusahaan yang dimilikinya, dikuasainya maupun merupakan bagian entah dengan langsung atau tak langsung pada Usaha menengah ataupun Usaha Besar yang mencukupi dari kriteria Usaha Kecil seperti yang dimaksudkan pada UU ini.
3. Usaha Menengah yakni usaha ekonomi dengan produktif yang berdirinya dengan sendiri yang dijalankan perseorangan maupun badan usaha yang tidak menjadi anakan dari perusahaan ataupun tidak sebagai cabang perusahaan yang dimilikinya, dikuasainya, maupun menjadi bagiannya entah dengan langsung atau tak langsung

Berbagai pendapat berhubungan dengan UMKM menurut Instansi serta lembaga yang berkaitan meliputi atas KEMENKOPUKM, memberi pernyataan akan Usaha Kecil (UK) yang termasuknya Usaha Mikro (UMI) yakni entitas usaha yang mengemban kekayaan bersihnya maksimal Rp. 200.000.000, tidak termasuknya tanah serta bangunan yang menjadi lokasi usaha, serta punya penjualan tahunan maksimal Rp. 1.000.000.000. Sedangkan, Usaha Menengah (UM) yakni entitas usaha kepunyaan warga negara Indonesia yang mengemban kekayaan bersihnya melampaui Rp. 2.000.000.000 hingga Rp. 10.000.000.000, tidak termasuknya tanah

serta bangunan. Sementara menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pendefinisian UMKM berdasar kepada jumlah tenaga kerja. Usaha Mikro yakni entitas yang mengemban total tenaga kerja 1 hingga 4 orang, Usaha Kecil mengemban total tenaga kerja 5 hingga 19 orang, sementara Usaha Menengah yakni entitas usaha yang mempunyai tenaga kerja 20 hingga 99 orang.

Tabel 6. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut UU No.20 Tahun 2008

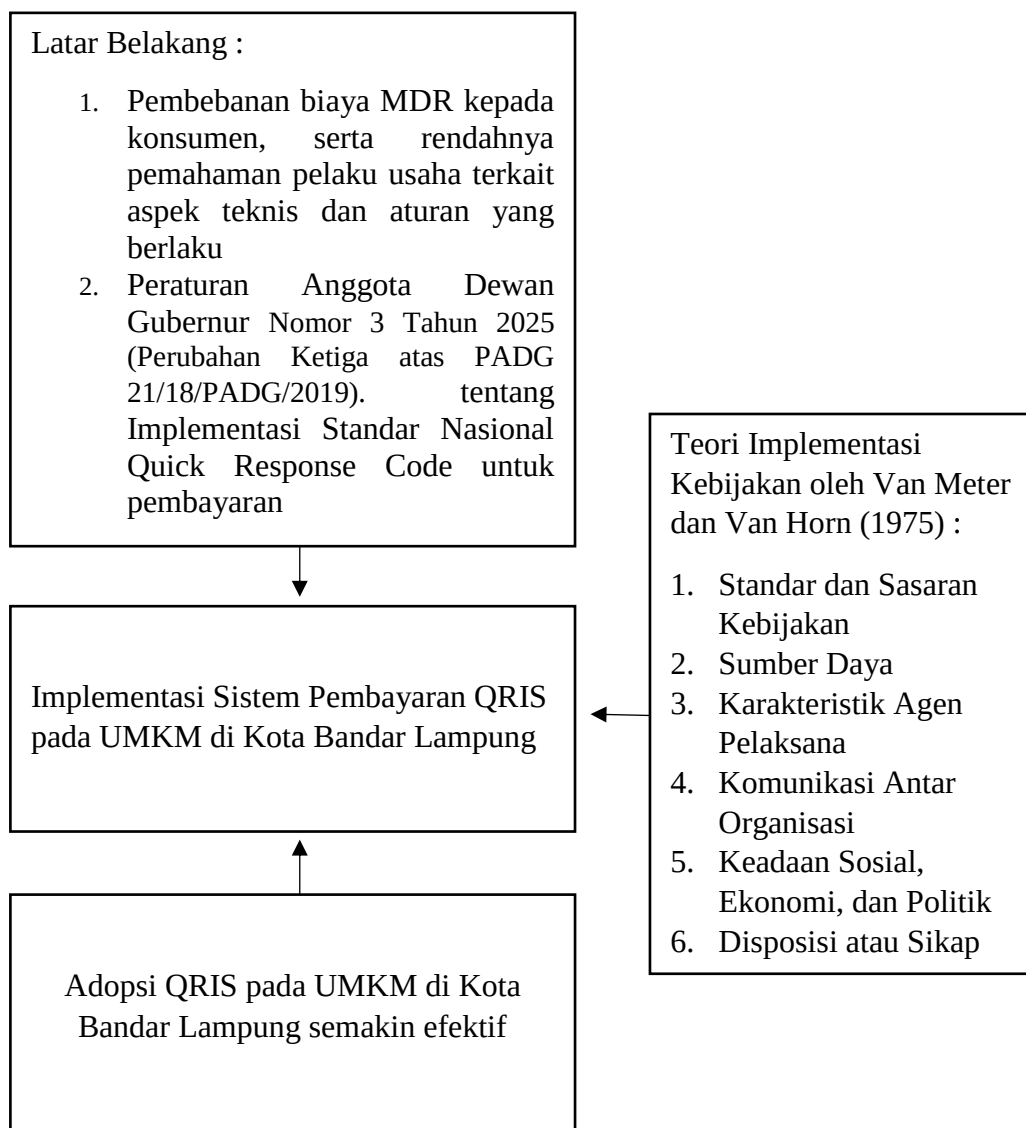
No.	Kriteria Usaha	Aset	Omset
1.	Usaha Mikro	Maksimal Rp50.000.000	Maksimal Rp300.000.000
2.	Usaha Kecil	Rp50.000.000 – Rp500.000.000	Rp300.000 – Rp500.000.000
3.	Usaha Menengah	Rp500.000.000 – Rp10.000.000.000	Rp2.500.000.000 – Rp50.000.000.000

Sumber: UU Nomor 20 Tahun 2008.

Berdasarkan data dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa Usaha Mikro merupakan unit usaha yang memiliki aset maksimal sebesar Rp50 juta, serta hasil penjualan tahunannya tidak melebihi Rp300 juta. Sementara itu, Usaha Kecil memiliki aset lebih dari Rp50 juta hingga maksimal Rp500 juta, dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar. Adapun Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta hingga maksimal Rp10 miliar, dan hasil penjualan tahunannya lebih dari Rp2,5 miliar hingga maksimal Rp50 miliar.

2.6 Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai permasalahan serta landasan teori yang telah disebutkan di atas, dapat diringkas dalam tabel kerangka pikir berikut.



Gambar 2. Kerangka Pikir
Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, penggunaan sistem pembayaran QRIS masih menghadapi berbagai kendala, seperti pembebanan biaya MDR kepada konsumen oleh beberapa UMKM, yang seharusnya ditanggung oleh merchant sesuai regulasi Bank Indonesia. Pelaku usaha enggan menanggung biaya MDR karena dianggap mengurangi keuntungan, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan konsumen dan menghambat inklusi keuangan. Selain itu, rendahnya pemahaman UMKM terhadap aspek teknis dan regulasi QRIS menyebabkan ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi

QRIS serta kendala yang dihadapi UMKM di Kota Bandar Lampung. Mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn (1975), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh standar dan target kebijakan, ketersediaan sumber daya, karakteristik pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik, dan disposisi atau sikap pelaksana. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam mengatasi tantangan implementasi QRIS guna mendukung digitalisasi UMKM dan meningkatkan daya saing ekonomi di Kota Bandar Lampung.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam implementasi sistem pembayaran QRIS pada UMKM di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penerapan QRIS pada UMKM, termasuk pemahaman pelaku usaha, kepatuhan terhadap regulasi, serta kesiapan infrastruktur teknologi. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dampak penggunaan QRIS terhadap efisiensi transaksi, inklusi keuangan, dan daya saing UMKM. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan implementasi QRIS guna mendukung digitalisasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian sangat krusial untuk menjaga agar penelitian tetap terarah dan terfokus pada isu utama yang ingin dianalisis. Dalam konteks penelitian tentang implementasi QRIS sebagai pada UMKM di Kota Bandar Lampung, fokus ini berfungsi untuk membatasi ruang lingkup penelitian pada aspek-aspek yang relevan dengan penerapan QRIS. Dengan fokus yang jelas, penelitian ini dapat mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi QRIS, seperti pemahaman UMKM, kepatuhan terhadap regulasi, dan kesiapan infrastruktur. Selain itu, penelitian ini menggali faktor pendukung keberhasilan QRIS dalam meningkatkan efisiensi transaksi dan inklusi keuangan, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat bagi pemerintah dan pelaku UMKM.

1. Fokus pertama pada penelitian ini adalah implementasi sistem pembayaran QRIS pada UMKM di Kota Bandar Lampung. Teori implementasi

kebijakan yang digunakan oleh peneliti adalah teori Van Meter dan Van Horn (1975) dimana terdapat enam indikator kunci dalam memberikan pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

Tabel 7. Fokus Penelitian

No.	Judul	Sub Fokus	Aspek-Aspek yang ingin diteliti
1.	Implementasi Sistem Pembayaran QRIS pada UMKM di Kota Bandar Lampung	Standar dan sasaran kebijakan	Penelitian ini mengkaji sejauh mana standar teknis QRIS dan sasaran kebijakan yang ditetapkan Bank Indonesia diterapkan oleh pelaku UMKM di lapangan.
2.		Sumber Daya	Bagaimana bentuk dukungan sumber daya dari Bank Indonesia sebagai regulator khususnya mengenai ketersediaan infrastruktur dalam implementasi QRIS bagi UMKM yang ada di Bandar Lampung.
3.		Karakteristik Pelaksana	Agen Penelitian ini meneliti struktur organisasi, pembagian peran, koordinasi internal, serta nilai-nilai yang dianut oleh agen pelaksana (Bank Indonesia).
4.		Komunikasi Organisasi	Antar Penelitian ini mengkaji efektivitas komunikasi dan koordinasi antara Bank Indonesia, PJSP, dan pelaku usaha dalam mendukung implementasi QRIS.
5.		Keadaan sosial, ekonomi, dan politik	Dari segi sosial, peneliti ingin meneliti sejauh mana kebijakan dapat diterima, dipahami, dan dijalankan secara efektif di lapangan. Dari aspek ekonomi, penelitian akan meneliti pengaruh QRIS terhadap efisiensi transaksi dan peningkatan omzet usaha. Sementara dari sisi politik, penelitian akan mengevaluasi koordinasi antara pemerintah daerah dan BI, dalam mendorong adopsi QRIS.
6.		Disposisi atau sikap pelaksana	Penelitian ini meneliti sikap, komitmen, serta responsivitas pelaksana kebijakan dalam mendampingi dan mengedukasi pelaku UMKM.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025.

2. Fokus kedua pada penelitian ini terkait kendala-kendala dalam implementasi sistem pembayaran QRIS. Hal yang akan diteliti terkait dengan kendala apa

saja yang muncul hingga menjadi penghambat dalam implementasi sistem pembayaran QRIS bagi UMKM.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dijalankan di Kota Bandar Lampung, dengan fokus utamanya pada pelaku UMKM di wilayah tersebut. Penelitian ini menargetkan UMKM yang telah menggunakan sistem pembayaran digital QRIS dalam operasional bisnis mereka dan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Lampung sebagai instansi pengelola kebijakan QRIS. Kota Bandar Lampung dipilih sebagai lokasi penelitian karena jumlah merchant yang menggunakan QRIS terbanyak berasal dari Kota Bandar Lampung, serta tantangan khusus yang dihadapi dalam pengembangan daya saing digital dan implementasi sistem pembayaran digital di daerah tersebut.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Acuan data berada pada fakta empiris yang ditemukan selama proses pengumpulan data oleh peneliti, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau memperoleh jawaban yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai teknik dalam proses penelitian. Berikut adalah beragam jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian:

1. Data primer mengarah dalam informasi yang diperolehnya dengan cara yang langsung melalui peneliti yang sumbernya lewat lapangan. Pada penelitian ini, data terkumpulkan mempergunakan proses wawancara serta hasil dari observasi. Adapun data primer yang dipergunakan di penelitian ini yakni melalui perekaman wawancara dengan langsung bersama narasumber serta menjalankan observasi yang berkaitan dengan pengimplementasian QRIS di UMKM. Dalam menjalankan wawancara, ada dua instrumen yang umumnya dipergunakan, yakni perekam suara serta pencatatan penelitian.
2. Data sekunder mengarah ke evidensi pendukung yang berasalnya melalui beragam sumber tertulis serta dipakainya oleh peneliti teruntuk menjadi informasi penunjang pada aktivitas mengkajikan data primer. Terdapat beragam sumber data yang dipergunakan teruntuk menjadi informasi tambahan, mencakupi dari peraturan per-UU, perda, artikel, jurnal, situs resmi

yang merupakan milik pemerintah, serta data lainnya yang mengandung relevansi guna memberi dukungan pada penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni tahapan teruntuk diperolehnya data pada bermacam setting, beragam sumber daya, serta caranya yang beda (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dijalankan oleh peneliti dengan jalan wawancara, observasi beserta dokumentasi.

1. Wawancara

Sugiyono (2018:304), wawancara merupakan metode efektif untuk memperoleh informasi mendalam terkait fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk menggali implementasi QRIS dari dua perspektif, yaitu pelaku UMKM dan pihak Bank Indonesia. Dari pelaku UMKM, wawancara bertujuan mengetahui pemahaman, manfaat, dan kendala penggunaan QRIS dalam usaha sehari-hari. Sementara dari pihak Bank Indonesia, wawancara difokuskan pada strategi implementasi, edukasi, serta koordinasi dengan penyedia jasa sistem pembayaran dalam mendorong adopsi QRIS di Kota Bandar Lampung.

Tabel 8. Informan Penelitian

No.	Informan	Jabatan
1.	Pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung	Analisis Yuniors Fungsi Implementasi Sistem Pembayaran
2.	Pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung	Swakelola Data Operation Sistem Pembayaran
3.	UMKM Tapisku By Hanan	Klaster Kerajinan
4.	UMKM Percetakan dan Fotocopy ALI	Klaster Jasa
5.	UMKM Warung Soto Bu yanti	Klaster Kuliner
6.	UMKM Lemonisme	Klaster Kuliner
7.	UMKM Mie Ayam Flamboyan	Klaster Kuliner

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025.

2. Observasi

Berdasarkan pandangan Raco (2018), observasi merupakan metode yang sangat berguna untuk memperoleh data secara langsung dari lapangan, terutama dalam melihat sikap, perilaku, dan interaksi individu yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, observasi dipergunakan teruntuk

menjalankan pengamatan dengan cara langsung penerapan dan penggunaan sistem pembayaran QRIS di kalangan UMKM di Kota Bandar Lampung. Melalui pengamatan langsung, peneliti dapat memahami lebih baik bagaimana UMKM di daerah tersebut mengadaptasi QRIS, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam penggunaannya. Observasi ini memberikan peneliti kesempatan untuk melihat secara nyata praktik di lapangan, memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait implementasi kebijakan, dan mengonfirmasi temuan yang didapatkan melalui wawancara atau data lainnya.

3. Dokumentasi

Berdasarkan pandangan Sugiyono (2018), dokumentasi yakni suatu metode untuk mengumpulkan data yang efektif guna menggali informasi terkait peristiwa atau kebijakan yang telah terjadi, baik dalam bentuk tulisan maupun visual, seperti foto atau sketsa. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk mendukung wawancara dengan informan dengan mengumpulkan berbagai bahan tertulis atau rekaman yang berkaitan dengan implementasi QRIS pada UMKM di Kota Bandar Lampung. Dokumen yang dikumpulkan bisa mencakup peraturan atau kebijakan terkait QRIS, laporan yang relevan, serta dokumentasi lainnya yang mencerminkan implementasi dan dampak QRIS. Melalui teknik dokumentasi, peneliti dapat memperkuat temuan data yang diperoleh, menambah kedalaman analisis, dan memastikan keakuratan informasi dalam konteks penelitian. Koleksi tersebut berbentuk dokumen kebijakan yang memberi aturan yang berkaitan dengan implementasi Sistem Pembayaran QRIS, diantaranya yaitu:

- 1) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (PADG) Nomor 3 Tahun 2025 mengatur Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran (QRIS).
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran.

- 3) Data lain yang memberi penunjang misal buku, dokumentasi, internet, jurnal, beserta sumber data sekunder lainnya.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong (2014: 248) yakni pengupayaan yang dijalankan melalui cara bekerja mempergunakan data, organisasi data, melakukan pemilahan menjadi satuan yang mampu dilakukan pengelolaannya, sintesisasi, melakukan pencarian serta mendapat pola, memperoleh apa yang penting serta yang dipelajarinya, dan mengambil putusan akan apa yang mampu terungkap pada orang lain. Miles dan Huberman (1992: 16-19) memberi pernyataan bahwasanya analisis data mencakupi atas tiga alur kegiatan yakni :

1. Pengumpulan Data (*data collection*)

Tahapan awal dari proses analisa data yang memiliki keterlibatannya akan kegiatan pengumpulan data. Pengumpulan data dapat diawali melalui pengamatan secara langsung maupun observasi untuk mengetahui fenomena yang muncul. Selanjutnya melalui dijalankannya wawancara serta dokumentasi mampu digunakan sebagai data pendukung pada analisa data sampai memperoleh penjelasan melalui fenomena yang muncul.

2. Kondensi Data (*data condensation*)

Kondensasi data yakni proses pemilihan, yang berfokus, melakukan penyederhaan, pengabstraksi, serta transformasi akan data yang mendekat pada semua bagian catatan lapangan dengan cara yng tertulis, transkrip wawancara, berbagai dokumen serta materi empiris. Simpulannya yakni sehabis peneliti menjalankan wawancara dengan langsung di lokasi serta mendapat data tertulis, berikutnya melakukan pemilahan akan transkrip wawancara teruntuk menghasilkan fokus penelitian yang diperlukannya oleh peneliti.

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion*)

Terakhir yakni melakukan penarikan akan simpulan. Penarikan simpulan disini dijalankan peneliti pada awal peneliti melakukan pengumpulan dari data misal menggali pemahaman yang tak mengemban pola, melakukan pencatatan akan keteraturan penjelasannya, serta alur sebab akibat, yang dalam tahapan akhirnya

diambil simpulan dari segala data yang diperolehnya oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penarikan atas simpulan berdasar kepada perumusan permasalahan yang diajukannya serta hasil data yang diperoleh Implementasi Sistem Pembayaran QRIS Sebagai Upaya Pengembangan UMKM di Kota Bandar Lampung.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yakni standar validitas yang diperolehnya. Setiap penelitian membutuhkan kriteria teruntuk memperhatikan derajat dari kepercayaan ataupun kebenaran yang berdasar kepada hasil penelitian. pada penelitian kualitatif, standar tersebut diberikan namanya dengan keabsahan data. Menurut Moleong (2014: 324) ada 4 kriteria yang dipergunakan teruntuk melakukan pemeriksaan pada keabsahan data yakni:

1. Derajat kepercayaan (*credibility*)

Dalam dasarnya diterapkannya derajat kepercayaan menggeser konsep validitas internal melalui non kualitatif. Kriteria ini mengemban fungsinya teruntuk menjalankan penyelidikan dengan demikian rupa yang membuat tingkatan kepercayaan dalam penemuan mampu diraih. Teruntuk memberi penilaian akan kredibilitas ataupun tingkatan dari kepercayaan, peneliti menjalankan triangulasi sumber yang berwujudkan aktivitas wawancara, observasi, serta dokumentasi. Triangulasi sumber yakni metode yang dipergunakan teruntuk menghasilkan validasi atas data penelitian melalui referensi silang melalui beragam sumber.

Oleh sebab itu, pada penelitian ini analisa uji kredibilitas yang dipergunakan oleh peneliti yakni triangulasi melalui pemakaian teknik triangulasi sumber, yang mana teknik ini dipakai guna menjalankan pengujian pada kredibilitas data melalui langkah pengecekan akan data yang telah diperolehnya berhubungan dengan implementasi Sistem Pembayaran QRIS pada UMKM di Kota Bandar Lampung baik dari bahan referensi yang berkaitan pada penelitian, hasil observasi, beserta wawancara bersama narasumber di lapangan.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Yakni pemeriksaan akan transferabilitas data ini dijalankan melalui pemberian kejelasannya yang mendalam serta amat akurat yang berhubungan pada hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti diharuskan untuk menyusun penguraian yang rinci, jelas, sistematis berkaitan pada bagaimana pengimplementasian Sistem Pembayaran QRIS pada UMKM di Kota Bandar Lampung.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Dalam konteks penelitian kualitatif, dilaksanakan audit pada semuanya dalam proses penelitian mulai dari bagaimana peneliti melakukan penentuan akan fokus/masalah, sumber data, saat masuk lapangan, menyusun analisa data, menjalankan uji keabsahan data hingga dengan menghasilkan simpulan. Dalam penelitian ini, uji dependability dijalankan melalui dosen pembimbing teruntuk menjalankan audit pada keseluruhan dari proses penelitian yang berhubungan dengan Implementasi Sistem Pembayaran QRIS pada UMKM di Kota Bandar Lampung.

4. Uji objektivitas (*confirmability*)

Confirmability, ataupun yang juga dikenalnya menjadi objektivitas penelitian, yakni aspek krusial yang memerlukan penimbangan pada penelitian akademis. Penelitian dinilai mengemban sifatnya yang objektif saat hasilnya sudah diterimanya melalui mayoritas individu. Dalam penelitian ini, uji objektivitas dilangsungkan melalui cara pemberian penjelasan atas proses penelitian yang dilaksanakannya berkaitan dengan Implementasi Sistem Pembayaran QRIS pada UMKM di Kota Bandar Lampung.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Implementasi sistem pembayaran QRIS pada UMKM di Kota Bandar Lampung telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efisiensi transaksi serta mendorong percepatan digitalisasi sektor keuangan, khususnya di kalangan pelaku usaha kecil. Penggunaan QRIS terbukti mempermudah proses pembayaran non-tunai, serta mendorong pelaku UMKM untuk lebih terbuka terhadap sistem transaksi digital yang modern dan akuntabel. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini di lapangan tidak lepas dari sejumlah hambatan. Keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada regulasi yang jelas atau kesiapan institusi pelaksana, tetapi juga sangat ditentukan oleh kesiapan teknis, ketersediaan infrastruktur, serta tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap teknologi tersebut. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, masih ditemukan kelemahan pada beberapa variabel penting, seperti pemerataan sumber daya, efektivitas komunikasi antarorganisasi, dan keadaan sosial, ekonomi, dan politik. Hambatan seperti koneksi internet yang tidak stabil, terbatasnya sosialisasi yang merata, serta keberatan terhadap biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) sebesar 0,3% menjadi tantangan tersendiri yang menghambat penerapan QRIS secara optimal. Oleh karena itu, implementasi QRIS secara umum telah menunjukkan perkembangan yang positif, namun untuk mencapai hasil yang maksimal dan berkelanjutan, diperlukan penguatan dalam aspek edukasi, pemerataan infrastruktur teknologi, serta penyesuaian kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi pelaku UMKM di lapangan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perluasan Jangkauan Edukasi dan Sosialisasi

Bank Indonesia dan PJSP perlu meningkatkan intensitas serta jangkauan sosialisasi kepada seluruh pelaku UMKM, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses informasi. Sosialisasi perlu dilakukan dengan pendekatan yang partisipatif dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

2. Peningkatan Infrastruktur Digital

Pemerintah daerah bersama penyedia layanan internet perlu memastikan ketersediaan koneksi internet yang stabil, terutama di wilayah yang menjadi pusat kegiatan UMKM. Hal ini penting agar transaksi QRIS dapat dilakukan secara lancar dan tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan konsumen.

3. Pendekatan Khusus terhadap Biaya MDR

Bank Indonesia dan PJSP sebaiknya mengintensifkan edukasi terkait biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) agar pelaku UMKM memahami bahwa potongan biaya tersebut merupakan bagian dari sistem layanan. Selain itu, mempertimbangkan skema insentif atau subsidi MDR untuk pelaku UMKM dengan omzet rendah atau usaha mikro yang baru mengadopsi QRIS dapat mendorong partisipasi yang lebih luas. Bank Indonesia perlu melakukan evaluasi lebih mendalam terhadap praktik di lapangan, khususnya terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan pembebanan biaya MDR. Evaluasi ini penting agar ditemukan solusi konkret dan tindak lanjut yang sesuai.

4. Peningkatan Literasi Digital dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pembayaran Non Tunai

Perlu adanya upaya untuk meningkatkan rasa ingin tahu, kepercayaan diri, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi modern, khususnya terkait dengan alat pembayaran non-tunai. Hal ini penting agar masyarakat dapat beradaptasi dan menggunakannya secara optimal dalam aktivitas jual beli. Selain itu, peran aktif masyarakat dalam mendukung implementasi sistem

pembayaran digital berbasis QR Code sangat dibutuhkan, mengingat sistem ini mampu mempercepat proses transaksi di Indonesia sekaligus membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan pendapatan serta daya saing usaha mereka di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Z. I. (2021). *Implementasi Kebijakan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Pontianak*. *Promaster-Jurnal Program Magister Ilmu Sosial*, 2(2).
- Anggra, S. (2014). *Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kinerja UMKM di Indonesia* [Skripsi, Universitas Indonesia].
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Asmita, S. K., & Suryantara, A. B. (2024). *The implementation of QRIS-based payment gateway system for the development of MSMEs*. *New Applied Studies in Management, Economics & Accounting*, 7(4), 26-37.
- A. G Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta :PustakaPelajar.
- Ayodya, R. W. (2020). *UMKM 4.0*. Elex Media Komputindo.
- Azhari, A. (2021). *Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS) Pada Sektor UMKM Di Kota Pematangsiantar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Baihaqi, M. A. (2024). *Penerapan Sistem Pembayaran Qris (Quick Response Indonesian Standard) Pada UMKM Di Kota Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Bank Indonesia. (2009). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2019). *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/Padg/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran*. Bank Indonesia.

- Bank Indonesia. (2020). *Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah*. Diakses pada 5 September 2024. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistempembayaran/default.aspx>.
- Bank Indonesia, “Setelah Bunga Acuan Turun, Masih Ribet dengan Banyak QR Code?,” dalam majalah Bank Indonesia Bicara (2019), h. 3.
- Balakrishnan, V., & Shuib, N. L. M. (2021). *Drivers and inhibitors for digital payment adoption using the Cashless Society Readiness-Adoption model in Malaysia*. *Technology in Society*, 65(June 2020), 101554. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101554>
- Christine, N. (2023). *Efektifitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk Meningkatkan Omset Penjualan pada UMKM di Bandar Lampung (Studi Kasus Kl Cofee Bandar Lampung, Kopi Ketje Kedaton dan Marley's Cafe)*. *Jurnal EMT KITA*, 7(3), 755-762.
- Darwiyani, A. P., Mahira, A. A., & Maharani, M. (2023). *Fenomena Penggunaan QRIS dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif Menuju Indonesia Emas 2045*. In *Prosiding Seminar Nasional Kemahasiswaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 10-18).
- Fasa, M. I., Hilal, S., & Normasyhuri, K. (2023). *Strategi Peningkatan Pertumbuhan Bisnis UMKM Provinsi Lampung Dengan Penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. *Jurnal Solma*, 12(3), 1557-1568.
- Gainau, P. C., Engko, C., & Gaspersz, Y. T. (2023). *Sistem pembayaran QRIS sebagai upaya pengembangan UMKM di kota Ambon*. *Journal of Business & Banking*, 13(2), 177-191.
- Hendarsyah, D. (2016). *Penggunaan uang elektronik dan uang virtual sebagai pengganti uang tunai di Indonesia*. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(1), 1-15.
- J.Moleong, Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mangani, R. (2009). *Macroeconomic effects on individual JSE Stocks: a GARCH representation*. *Investment Analysts Journal*, 38(69), 47-57.
- Kabarsiger. (2022, Juni 22). *Dorong transaksi digital, BI Lampung launching program S.I.A.P QRIS PUSAKA*. Kabarsiger.com.

<https://kabarsiger.com/read/dorong-transaksi-digital-bi-lampung-launching-program-s-i-a-p-qriskpusaka>

- Listiyono, H., Sunardi, S., Wahyudi, E. N., & Diartono, D. A. (2024). Dinamika Implementasi QRIS: Meninjau Peluang dan Tantangan bagi UMKM Indonesia. *IKRA-ITH Informatika: Jurnal Komputer dan Informatika*, 8(2), 120-126.
- Mayanti, R. (2020). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerimaan user terhadap penerapan Quick Response Indonesia Standard sebagai teknologi pembayaran pada dompet digital*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 25(2), 123-135.
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Paydia. (n.d.). *Panduan penggunaan QRIS & penjelasan yang lengkap*.
- Purba, D.W., Dalimunthe, B.A., Septariani, D.N., Mahayati, Setiawan, R.B., Sudarmi, N., Megasari, R., Inayah, A.N., Anwarudin, O dan Amruddin. 2022. *Sistem Pertanian Terpadu: Pertanian Masa Depan*. Medan. Penerbit Yayasan Kita Menulis. 1-141
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Raco, J. 2018. *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Rusli, Budiman. 2015. *Kebijakan Publik (Membangun Pelayanan Publik yang Responsif)*. Bandung: ADOYA.
- Silviana, S. (2023, Januari 4). *Pengguna QRIS di Lampung meningkat terbanyak di Bandar Lampung*. IDN Times Lampung. <https://lampung.idntimes.com/business/finance/silviana-4/pengguna-qriskdilampung-meningkat-terbanyak-di-bandar-lampung?page=all>
- Sos, J. P. S. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press.
- Sriekaningsih, A. (2020). *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0*. Penerbit Andi.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*. R&D, penerbit Alfabeta, Bandung
- Sulaeman, S. (2023). *Perbandingan Tingkat Pendapatan UMKM Di Masa Pandemi Dan Pasca Covid-19 (Studi Kasus Di Objek Wisata Loang Baloq Kota*

- Mataram). *Jemba: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(4), 431-444.
- Sutmasa, Y. G. (2021). *Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik*. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25-36.
- Tarman, M., Septiana, A., Arisinta, O., & Mariatun, I. L. (2023). *Financial Planning Melalui Penggunaan Qris Bagi Tenaga Kependidikan Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo (FIKS UTM) di Bangkalan Madura*. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 8(1), 57-62.
- Tresiana, N., & Djuaji, N. (2017). *Kebijakan Publik Teori dan Praktek Model-model Pengelolaan Pembangunan Daerah*. Bandar Lampung: Suluh Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Sebagai Undang-Undang.
- Yolanda, C. (2024). *Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia*. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS*, 2(3), 170-186. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>
- Yutaviando, A. (2019). *Analisa Determinan Preferensi Transaksi Non-Tunai (Studi Kasus Penggunaan E-Money Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2)
- Warjiyo, P. (2016). *Bauran kebijakan bank sentral: Konsepsi pokok dan pengalaman Bank Indonesia* (Seri Kebanksentralan No. 25). Bank Indonesia Institute.